



AUTORIZED  
MONEY CHANGER

# KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB)



# PROFILE



AUTORIZED  
MONEY CHANGER



# APVA

## Indonesia

**ASOSIASI PEDAGANG VALUTA ASING X**


**AFILIASI PENUKARAN VALUTA ASING ✓**

# PROFILE



AUTORIZED  
MONEY CHANGER

# APVA Indonesia



**Badan Pengurus Pusat  
(BPP)**

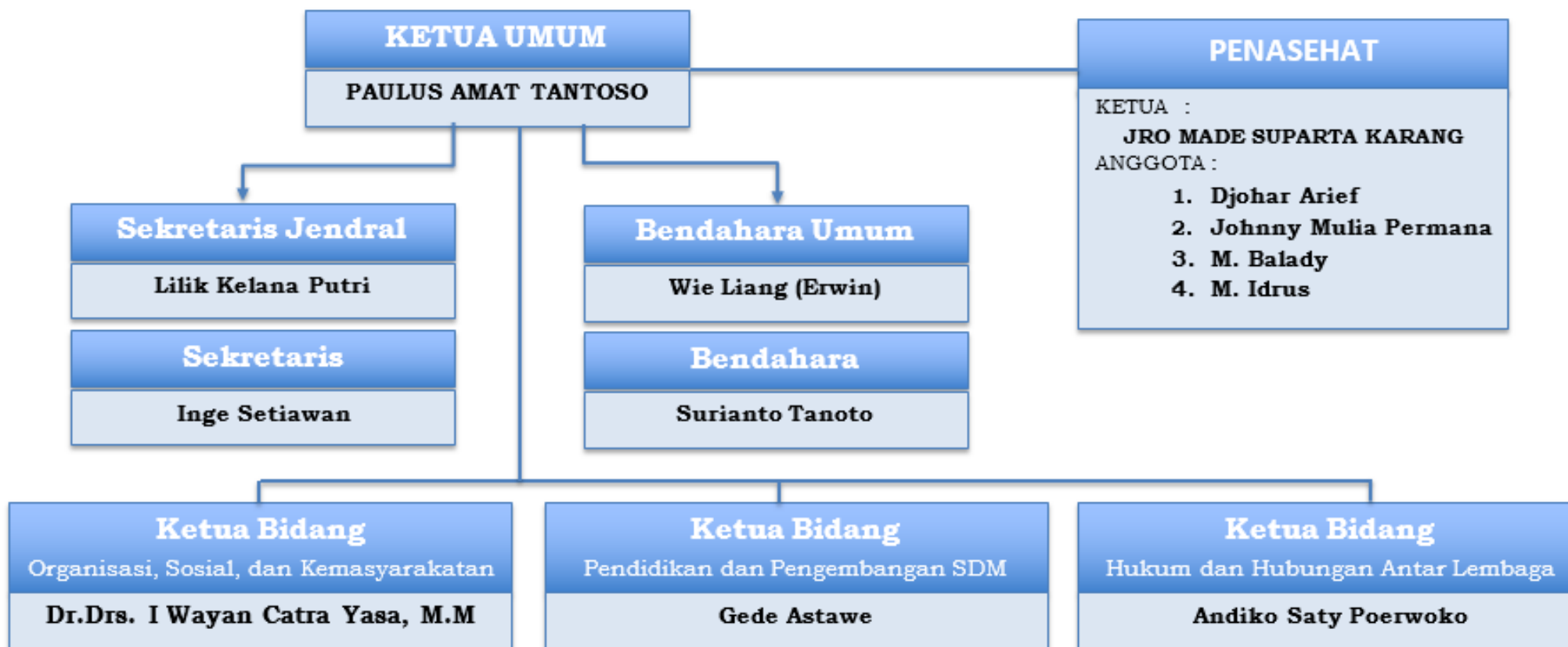
**Badan Pengurus Daerah  
(BPD)**

# PROFILE



AUTORIZED  
MONEY CHANGER

## SUSUNAN PERSONALIA BADAN PENGURUS PUSAT AFILIASI PENUKARAN VALUTA ASING INDONESIA MASA BAKTI 2022-2026



# Perkembangan



AUTHORIZED  
MONEY CHANGER

## Badan Pengurus Daerah (BPD)



1. BPD DKI Jakarta
2. BPD Banten
3. BPD Jawa Barat
4. BPD Jawa Tengah
5. BPD Jawa Timur
6. BPD Bali
7. BPD DI Yogyakarta
8. BPD Nusa Tenggara Barat
9. BPD Sumatera Barat
10. BPD KEPRI
11. BPD Kalimantan Barat

# Perkembangan



AUTHORIZED  
MONEY CHANGER

## 2021

Kantor Pusat 1.177

Kantor Cabang 2.468

## 2022



[https://bit.ly/APVA\\_FormRegistrasiAnggotaAPVA](https://bit.ly/APVA_FormRegistrasiAnggotaAPVA)

## Faktor Penyebab KUPVA BB Tutup

### KETENTUAN



#### PBI 18/20/PBI/2016 tentang KUPVA

- Izin 5 Tahun
- Syarat Pendidikan minimal D3 (pasal 19)

### TERDAMPAK LANGSUNG PANDEMI



#### Dampak Langsung Pandemi Covid 19

- Bandara Banyak Tutup
- Hotel, Pusat Perbelanjaan (Mall) dan bisnis lainnya tidak beroperasi
- Bisnis merugi, dampak PPKM

### TATA KELOLA



#### Tata Kelola yang Buruk

- Tidak konsisten dan fokus pada usaha
- Kurang memahami ketentuan
- SDM yang seadanya

### FAKTOR LAINNYA



#### Faktor Lainnya

- Pemilik berganti usaha / bidang lainnya

# Strategi



AUTHORIZED  
MONEY CHANGER

## MEMPERLUAS JARINGAN



- Bekerjasama dengan KUPVA BB
- Bekerjasama dengan Bank
- Nasabah Korporasi Pemerintah & BUMN



## MANAJEMEN RISIKO

- Risiko Inhern
  - Nilai Tukar
  - APU PPT
  - Risiko Operasional
  - Pengaduan Konsumen dll
- Risiko Lainnya.
  - Pandemi

## PENINGKATAN KUALITAS SDM



- Pelatihan secara berkala (Internal)
- Capacity Building
- Seminar-seminar
- Sertifikasi Profesi (SPPUR)



## TATA KELOLA

- Mengacu pada GCG (Good Corporate Governance)
- Compliance (ketaatan pada ketentuan)

## STRATEGI PEMASARAN



- Memanfaatkan Teknologi informasi melalui sosmed
- Marketing Mix (4P)



## PENGEMBANGAN LAYANAN

- Go Valuta/Gestun
- Sosial Media/Online







AUTHORIZED  
MONEY CHANGER

# PERAN APVA DI BANK INDONESIA

1. **DKSP** : Departemen Kebijakan dan Sistem Pembayaran
2. **DPSP** : Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
3. **DPUK** : Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen
4. **DPPT** : Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri

# Kewajiban di KUPVA



- 1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU)** : Bulanan
- 2. Laporan Keuangan Tahunan**  
Neraca, Laba/Rugi, Perubahan ekuitas
- 3. Laporan Tahunan APU PPT**  
Laporan yang berisi pelaksanaan APU PPT dalam tahun berjalan/SELF ASESMENT
- 4. Laporan Insidentil**  
Pergantian pengurus/pemegang saham, pindah alamat kantor pusat/cabang, perubahan modal dll
- 5. DTTOT** (menerima tembusan dari surat yang dikirim ke Densus 88)
- 6. Laporan Perlindungan Konsumen**



- 1. GoAml**  
LTKM dilaporkan paling lambat 3 hari setelah ditetapkan adanya TKM  
LTKT dilaporkan paling lambat 14 hari dari tanggal transaksi
- 2. SIPESAT** (melalui GRIPS2)  
Entri data baru (data nasabah baru) dilaporkan triwulan-an
- 3. SIPENDAR**  
Permintaan data terduga teroris (DTTOT)
- 4. PEP's**  
Aplikasi yang dibuat PPATK untuk digunakan oleh Penyelenggara

# Pelaporan Baru



AUTHORIZED  
MONEY CHANGER

## Perlindungan Konsumen Kewajiban Pelaporan

Penyelenggara wajib menyampaikan laporan terkait Perlindungan Konsumen kepada Bank Indonesia, mencakup :

1. Laporan rencana pelaksanaan edukasi;
2. Laporan pelaksanaan edukasi; dan
3. Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Konsumen.



### HARAPAN





Disediakan mekanisme pelaporan yang sederhana  
➤ berupa “**Template Pelaporan**”

# e-licensing

- Permohonan diterima BI bulan Agustus 2021
- Direspon kembali oleh BI di bulan Januari 2022
- Hingga saat ini belum keluar izinnya padahal sudah on site visit
- Hampir 1 tahun



09.40 4G 0.00 KB/S 🌙 🔒 ⌚ 83

✕  **Daftar Perizinan S...**     
bi.go.id

---

### Riwayat Status

**Nomor Surat Permohonan Izin**  
001/VSM/DPK/VII/2021

**Tipe Ijin**  
Permohonan Penyelenggara KUPVA BB

No	Tanggal	Status
1	22/07/2021	Konsep
2	20/08/2021	Diterima Bank Indonesia
3	10/01/2022	Perlu Diperbaiki Kelengkapan dan Kebenaran secara Administratif
4	24/01/2022	Revisi Kelengkapan dan Kebenaran Secara administratif
5	03/02/2022	Dokumen Lengkap dan Benar secara Administratif

# e-licensing

- Dokumen diterima BI bulan Agustus 2021
- Desakan minta dipercepat melalui email : [cs\\_perizinan@bi.go.id](mailto:cs_perizinan@bi.go.id) cukup efektif
- Izin minggu ke 4 Bulan Maret 2022 disetujui (kurang lebih 7 Bulan)



09.47 4G 3.00 KB/S

Daftar Perizinan S...  
bi.go.id

Riwayat Status

**Nomor Surat Permohonan Izin**  
02/DAS/VII/21

**Tipe Ijin**  
Permohonan Penyelenggara KUPVA BB

No	Tanggal	Status
1	27/08/2021	Konsep
2	27/08/2021	Diterima Bank Indonesia
3	28/09/2021	Perlu Diperbaiki Kelengkapan dan Kebenaran secara Administratif
4	01/10/2021	Revisi Kelengkapan dan Kebenaran Secara administratif
5	05/10/2021	Do kumen Lengkap dan Benar secara Administratif
6	29/11/2021	Do kumen Tidak Sesuai dan Tidak Benar - Perlu Diperbaiki
7	29/11/2021	Revisi Kesesuaian dan Kebenaran
8	10/01/2022	Do kumen Sesuai dan Benar
9	23/03/2022	Permohonan izin disetujui dan harus menyampaikan laporan efektif operasional sesuai batas waktu dalam ketentuan

# e-licensing

- Bulan April 2021 Permohonan di submit dengan PIC A
- Bulan Oktober 2021 berganti PIC B submit ulang dan dokumen dinyatakan lengkap sekaligus on site visit
- Maret 2022 izin disetujui
- Butuh waktu 6 bulan untuk mendapatkan izin KUPVA



## Riwayat Status

Nomor Surat Permohonan Izin

0028

Tipe Ijin

Permohonan Penyelenggara KUPVA BB

No	Tanggal	Status
1	16/04/2021	Konsep
2	28/07/2021	Diterima Bank Indonesia
3	30/08/2021	Dokumen Tidak Sesuai dan Tidak Benar - Perlu Diperbaiki
4	24/09/2021	Revisi Kesesuaian dan Kebenaran
5	30/09/2021	Perlu Diperbaiki Kelengkapan dan Kebenaran secara Administratif
6	09/10/2021	Revisi Kelengkapan dan Kebenaran Secara administratif
7	14/10/2021	Dokumen Sesuai dan Benar
8	19/10/2021	Dokumen Tidak Sesuai dan Tidak Benar - Perlu Diperbaiki
9	21/10/2021	Revisi Kesesuaian dan Kebenaran
10	21/10/2021	Dokumen Sesuai dan Benar
11	25/10/2021	Pemeriksaan Lokasi
12	19/11/2021	Persetujuan Tindak Lanjut Disetujui
13	07/03/2022	Permohonan izin disetujui dan harus menyampaikan laporan efektif operasional sesuai batas waktu dalam ketentuan

# e-licensing

- Permohonan diajukan mulai bulan Nopember 2021
- Dokumen dinyatakan sesuai dan benar pada bulan Mei 2022
- Izin belum keluar hingga saat ini
- Pelaksana mengajukan izin ini di tempat perbelanjaan (mall) sehingga selama mengajukan izin sudah menyewa tempat, membayar sewa ruangan, service charges, listrik, air, telp, karyawan dll
- Pelaksana harus menanggung kerugian



## Riwayat Status

**Nomor Surat Permohonan Izin**

01/11/OPIJ/PPSIUPBI

**Tipe Ijin**

Permohonan Penyelenggara KUPVA BB

No	Tanggal	Status
1	15/11/2021	Konsep
2	26/11/2021	Diterima Bank Indonesia
3	11/04/2022	Perlu Diperbaiki Kelengkapan dan Kebenaran secara Administratif
4	11/04/2022	Revisi Kelengkapan dan Kebenaran Secara administratif
5	19/05/2022	Dokumen Sesuai dan Benar

# e-licensing

## PEDOMAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN

## PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK

Tabel 1. Jenis Aspek dan Sub-Aspek Studi Kelayakan

No	Jenis Aspek	Sub-Aspek
1	Potensi Pasar	1.1. Potensi Usaha
		1.2. Posisi dan Analisis Pasar
2	Kondisi Persaingan	2.1. Analisis Pesang
		2.2. Analisis keunggulan kompetitif
3	Strategi Bisnis	3.1. Fokus Bisnis
		3.2. Lokasi dan Rencana Jaringan
		3.3. Produk/Layanan
		3.4. Rencana Pemasaran
		3.5. Rencana Supply UTKA
		3.6. Mekanisme Penetapan Kurs
4	Organisasi internal	4.1. Rencana SDM
		4.2. Rencana Infrastruktur
		4.3. Rencana Itra Kelola
5	Keuangan	5.1. Jumlah Modal dan alokasinya
		5.2. Proyeksi neraca dan lab/rugi

### I. Pendahuluan

Dalam rangka memenuhi persyaratan permohonan izin sebagai penyelenggara KUPVA Bukan Bank, maka kami PT. Valuta Sukses Mandiri telah melakukan studi kelayakan penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Dalam studi kelayakan ini, akan kami sampaikan 5 (lima) aspek utama, yaitu potensi pasar, kondisi persaingan, strategi bisnis, organisasi internal, dan keuangan dari perusahaan kami. Berikut adalah kelima jenis aspek tersebut yang akan diuraikan masing-masing pada Bab II.

Permohonan Pen...  
bi.go.id

30 Ok Dokumen Dokumen  
Kesiapan Kesiapan  
Operasional - Operasional -  
Studi kelayakan Studi kelayakan  
pendirian pendirian  
Penyelenggara Penyelenggara  
sebagaimana sebagaimana  
Lampiran II.L SEBI Lampiran II L  
KUPVA BB SEBI KUPVA  
BB.pdf

Permohonan Pen...  
bi.go.id

8 Ok Dokumen Dokumen  
Kelembagaan - Kelembagaan -  
Laporan keuangan Laporan  
perusahaan yang keuangan  
ditandatangani perusahaan yang  
oleh Direksi dan ditandatangani  
Dewan Komisaris. oleh Direksi dan  
Dewan Komisaris.pdf

1. Kesulitan yang dihadapi KUPVA untuk mempersiapkan perizinan dalam e-licensing adalah di dokumen kesiapan operasional (studi kelayakan pendirian penyelenggara) dan dokumen kelembagaan (laporan keuangan perusahaan)
2. Pertanyaannya : Apakah RKAP (Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan) pelaksanaannya harus sama dengan Laporan Keuangan di point 8, karena KUPVA rata-rata tidak membuat RKAP sampai 5 tahun ?



# e-licensing

The screenshot shows the mobile application interface for e-Licensing Bank Indonesia. At the top, there is a status bar with the time 23.23, signal strength, Wi-Fi, and data usage (0.70 KB/S). Below the status bar is a blue header with the Bank Indonesia logo and the text "e-Licensing Bank Indonesia". A hamburger menu icon is visible on the right side of the header. The main menu consists of four items: "Profil", "Permohonan", "Data Pokok", and "12 Ketentuan KUPVA BB". Under "12 Ketentuan KUPVA BB", there are two bullet points: "PBI 18 20 PBI 2016 – Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank" and "SEBI 18 42 DKSP - Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank".

## Daftar Isi

- II.A. Contoh Surat Permohonan Izin Sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
- II.B. Daftar Dokumen Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Kelembagaan dan Kondisi Keuangan
- II.C. Daftar Pendukung Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Dari Pemegang Saham, Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris
- II.D. Dokumen Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Kesiapan Operasional
- II.E. Contoh Surat Kuasa Pengambilan Dokumen
- II.F. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kantor Pusat/Kantor cabang
- II.G. Contoh Surat Permohonan Perpanjangan Izin Sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
- II.H. Contoh Daftar Isian Kekayaan Pemegang Saham
- II.I. Contoh Surat Pernyataan Pemegang Saham Individu
- II.J. Contoh Surat Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum
- II.K. Contoh Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris
- II.L. Contoh Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank

1. Dalam e-licensing hanya dicantumkan PBI dan SEBI saja tetapi **tidak ada contoh dokumen Lampiran II SEBI** dalam bentuk **word/excelnya atau template** sehingga kita harus membuka link lain dan mendownload sendiri misalnya di link <http://bit.ly/KUPVABBDKI>, sebaiknya dicantumkan juga link tersebut atau daftar lampiran SEBI di e-licensing
2. Banyak KUPVA bertanya apabila akan melakukan **perubahan pengurus dan pemegang saham** dokumen apa saja yang harus disiapkan karena di dalam e-licensing tidak ada data dokumen tersebut

# e-licensing

## Pertanyaan seputar e-licensing



Proses perizinan dalam ketentuan 14 hari kerja pada kenyataannya melebihi waktu yang sudah ditetapkan

Pertanyaannya adalah : dimulai dari mana penentuan pengurusan izin 14 hari kerja, apakah sejak dokumen dinyatakan lengkap (sesuai dan benar) atau dokumen diterima oleh BI

### Untuk penelitian dokumen seperti :

- Izin Kupva BB baru : .....Hari
- Izin Cabang : .....Hari
- Pergantian Pengurus : ..... Hari
- Pindah alamat KP : ..... Hari
- Pindah alamat KC : ..... Hari
- Perubahan Modal : ..... Hari

*Dari dokumen disubmit ke e-licensing*

### Selanjutnya :

Setelah dokumen yg disampaikan oleh Penyelenggara sudah lengkap dan benar secara administrative :

- Untuk onsite visit : ... Hari
- Setelah onsite visit, dilakukan penyuluhan kepada pengurus dan pemegang saham : ... Hari
- Setelah dilakukan penyuluhan, kemudian untuk proses persetujuan izin nya dibutuhkan waktu : ... hari

# e-licensing

## Masukan (Saran) :

1. Proses Izin baru atau cabang membutuhkan IMB padahal banyak pelaku KUPVA memiliki tempat/sewa ruangan yang tidak memiliki IMB, harusnya ada solusi proses pengurusan apakah cukup dengan surat keterangan RT/RW/Lurah setempat, untuk menggantikan IMB tersebut.
2. Proses pembuatan Akta Pendirian sebaiknya BI memberikan kepastian untuk KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) karena penomoran KBLI dalam akta sering membingungkan apalagi sekarang sudah ada KBLI baru tahun 2020, yang sebelumnya KBLI 2017, dengan beda penomoran, untuk KBLI tahun 2017 KUPVA menggunakan nomer 66126 dan KBLI tahun 2020 KUPVA menggunakan nomer 66160.
3. Seringnya berganti PIC menghambat komunikasi antara Penyelenggara dengan PIC yang sudah ditetapkan oleh BI, serah terima tugas dari PIC lama ke PIC baru mungkin menyebabkan terganggunya komunikasi Penyelenggara dengan PIC baru, informasi yang kami terima dari KUPVA bahwa PIC mereka bisa berganti hingga 3-4 kali.
4. Proses Perizinan dipercepat agar Penyelenggara segera bisa berdagang dan bertransaksi.
5. Masih banyak KUPVA **TIDAK BERIZIN**, berkegiatan, ditambah pula banyak KUPVA BB yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai KUPVA BB (izinnya tidak diperpanjang) pada akhirnya mereka bertransaksi valas dari rumah, (black market) karena mereka punya konsumen tetap.

# e-licensing

6. Bagi Penyelenggara yang sudah memiliki user id dan password, pada saat mau mengajukan izin (misal : pindah alamat Kantor Pusat), kendala yang dihadapi yaitu : pada sistem e-licensing belum dilakukan migrasi oleh Bank Indonesia, sehingga si pemilik user tidak bisa melanjutkan proses pengajuannya melalui e-licensing.
7. Untuk user yang sudah pernah melakukan pengurusan melalui e-licensing (misal : pergantian pengurus dan perpanjangan ijin), lalu mau mengajukan proses perizinan lain, nama perusahaan di profil e-licensing bisa berubah menjadi nama perusahaan Penyelenggara yang lain, sehingga tidak bisa melanjutkan proses permohonannya.
8. PIC Bank Indonesia yang menangani perizinan diharapkan mudah diajak komunikasi, informasi yang kami dapatkan dari anggota di daerah banyak yang mengeluh sulitnya berkomunikasi dengan PIC Bank Indonesia.
9. Apabila BI sudah mulai melakukan pengecekan dokumen, sebaiknya BI mengupdate statusnya menjadi pengecekan/penelitian dokumen supaya kita tau juga prosesnya sudah sampai dimana, dan seterusnya apabila ada perubahan status agar selalu mengupdate, agar kita selaku pemohon bisa mengetahui prosesnya sudah sejauh mana, dikarenakan prosesnya yang lama dan tidak ada update status, kita selaku pemohon akhirnya mengirimkan email ke [cs\\_perizinan@bi.go.id](mailto:cs_perizinan@bi.go.id), kemudian email yang kita kirim itu di forward ke BI KPwDN yang menangani perizinan dan di cc ke kita, biasanya setelah itu, barulah BI KPwDN tersebut membalas email kita dengan alasan masih dalam proses penelitian dokumen

# e-licensing

10. Keluhan dari Penyelenggara bahwa izin cabang sering kali butuh waktu lama pengurusannya, minimal 6 bulan baru mendapatkan izin, padahal kalau kita menyewa di mall (tempat perbelanjaan) atau bandara (airport) mereka sudah menghitung biaya sewa sejak ditandatangani Kontrak Kerjasama (Perjanjian Sewa Menyewa), sementara dalam proses perizinan Perjanjian Sewa Menyewa dan kesiapan operasional (meja counter dan sarana prasarana harus sudah dilengkapi) menjadi syarat utama permohonan izinnya.  
Proses yang lama mengakibatkan sewa, service charges, biaya SDM dan operasional lainnya sudah berjalan sementara kita belum bisa operasional karena izin dari BI belum disetujui, siapa yang akan menanggung kerugian tersebut?
11. Sebaiknya untuk perizinan BI membuat 2 izin seperti BI ketika tahun 1980, BI ketika itu memberikan 2x izin :  
**Pertama izin Sementara dan Kedua izin Definitif.**  
**Izin sementara** diberikan dengan maksud agar Penyelenggara dapat membuka kantor dan melakukan transaksi sekaligus mempersiapkan diri untuk **izin definitifnya**, izin sementara berlaku 6 (enam) bulan, dalam jangkang waktu itu KUPVA mempersiapkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BI, apabila Penyelenggara tidak dapat mempersiapkan sesuai dengan ketentuan BI maka Izin tidak diterbitkan, BI tidak melanjutkan ke izin selanjutnya dan Penyelenggara harus menutup kantornya, sehingga KUPVA tidak mengalami kerugian hanya karena menunggu izin disetujui.

# e-licensing

12. Dalam Buku Petunjuk Penggunaan e-licensing untuk Pembawaan UKA sebaiknya memberikan gambaran transaksi dengan contoh yang realistis, misalnya jenis mata uang yang sering dipergunakan yaitu : USD, SGD dll, kemudian asal negara import berasal dari negara yang lazim kita jadikan *counterparty* seperti Singapura, Malaysia atau Hongkong, contoh di bawah ini negara asal/tujuan : **Afganistan**, kita ketahui negara tersebut adalah negara konflik dan termasuk dalam kategori FATF dan sebaiknya penulisan untuk airport juga dituliskan dengan benar misalnya Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng - Jakarta tidak menuliskan **Ancol**

**e-Licensing Bank Indonesia** Profil Perizinan/Pendaftaran

### Persetujuan Setiap Pembawaan UKA (Penumpang).

Realisasi Permohonan Kuota Pembawaan UKA

**Periode Pembawaan UKA\*** 2018 - Periode II - April s.d Juni

**Kategori pembawaan\*** Impor

**Tanggal Pembawaan\*** 31/05/2018

**Keperluan Pembawaan\***

- Walking Customer
- Nasabah Utama
- Keperluan Perusahaan
- Penggantian UKA Lusuh
- Keperluan Nasabah Yang Akan Umroh/ Haji
- Untuk Jual/ Beli
- Lainnya

**Negara Asal/Tujuan\*** AFGHANISTAN

**Pintu Pabean\*** Abu Road

**Cara Pembawaan\*** Penumpang

**e-Licensing Bank Indonesia** Profil Permohonan Data Pokok Bantuan Adminmoney@yopmail.com

### Permohonan Kuota Pembawaan UKA.

Rencana Pembawaan UKA untuk Pengajuan Kuota

**Periode Pembawaan** 2020 Periode III - Juli s.d September

**Kantor Perwakilan BI** - Pilih -

		Periode								
Jenis Mata Uang	Kategori	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	Jumlah Nilai Pengajuan Kuota	Jumlah Persetujuan Nilai Pengajuan Kuota	Sisa Kuota			
AED	Impor	1.000,00			1.000,00					

Bulan	Jenis Mata Uang	Nominal Pengajuan	Jumlah Ekuivalen (Rp)	Keperluan Pembawaan	Kategori Pembawaan	Negara Asal/Tujuan	Pintu Pabean	Cara Pembawaan	Pihak Pembawaan	Keterangan	Counterparty
JULI	AED	1.000,00	4.084.252,85	Walk-in Customer	Impor	AUSTRIA	Ancol	Penumpang	Sendiri		fedex

### Dokumen Pembawaan

No.	Status	Jenis Dokumen	Nama Dokumen	Tindakan
1	Belum diunggah	Lain-Lain <span style="display:none"> (tidak wajib)</span>		
2	Belum diunggah	Lain-Lain <span style="display:none"> (tidak wajib)</span>		
3	Belum diunggah	Lain-Lain <span style="display:none"> (tidak wajib)</span>		
4	Belum diunggah	Lain-Lain <span style="display:none"> (tidak wajib)</span>		
5	Belum diunggah	Lain-Lain <span style="display:none"> (tidak wajib)</span>		

[Kembali](#)

Konferensi Pers di Polres Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, jam 13.00 wib, atas tertangkapnya penipuan dengan menggunakan cek kosong, dimana pelaku mengaku sebagai pemilik toko, sehingga money changer percaya ketika tersangka memberikan pembayaran pembelian USD dan SGD dengan cek yang ternyata kosong.





**Website : [www.apvaindonesia.com](http://www.apvaindonesia.com)**

**Email : [apvaindonesia@gmail.com](mailto:apvaindonesia@gmail.com)**

**Lilik Kelana Putri : 0811 95 9292**





**THANK YOU**